KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kunker DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp 945 M: KPK Tunggu Laporan
Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 5

Kunker DPR Berpotensi Rugikan Negara Rp 945 M

KPK Tunggu Laporan

[JAKARTA] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara dalam kunjungan kerja perseorangan atau reses anggota DPR. Bahkan potensi kerugian negara itu telah mencapai sebesar Rp 945 miliar.

Sebelumnya, beredar surat pemberitahuan dari Fraksi PDI-P yang meminta anggotanya membuat laporan kunjungan saat masa reses. Surat itu diteken Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto.

Penyebab munculnya surat pemberitahuan lantaran ada surat dari Sekretariat Jenderal DPR tentang keraguan terhadap kunjungan kerja para anggota DPR. Kejanggalan kunjungan kerja itu mengakibatkan potensi kerugian negara Rp 945 miliar.

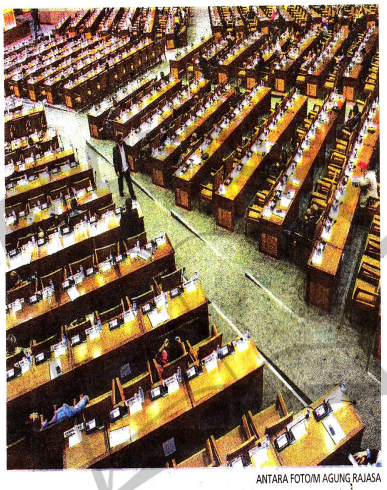
Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, BPK melakukan audit dan melakukan uji petik atau *sampling*. Ternyata ada laporan yang tidak memenuhi persyaratan.

"Pelaporan yang tak memenuhi syarat ini artinya susah diverifikasi.Apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota dewan itu bisa dibuktikan atau tidak gitu, *toh*?" ujar Hendrawan, Kamis (12/5).

Hendrawan menjelaskan, kadang-kadang ada foto yang sama digunakan berkali dan kemudian staf yang sama sehingga menurut BPK akuntabilitasnya tidak memadai. Hal itu, kata dia, bukan hanya dilakukan anggota PDI-P namun seluruh fraksi yang ada di DPR.

"PDI-P dalam rapat Jumat terakhir sebelum reses membuat format laporan untuk dipenuhi seluruh anggota fraksi. Kemarin sudah diingatkan kembali oleh Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto, supaya dalam satu tahun terakhir, semua akan disusun ulang," jelasnya.

Ia tidak memungkiri adanya oknum anggota Dewan yang sangat sibuk dan lebih banyak percayakan kegiatannya pada tenaga ahli di lapangan. Sehingga aktifitas anggota dewan itu menurut audit BPK, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah secara keuangan.



ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

Suasana Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Dari total 559 anggota, hanya 309 anggota DPR yang menghadiri rapat dengan agenda utama penyampaian Ikhtisar Semester II hasil Pemeriksaan BPK tahun 2015 dan penetapan susunan dan keanggotaan Pansus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Selama ini, *kan*, anggota Dewan anggap enteng pelaporan seperti itu.K egiatan politik banyak yang tidak bisa dilaporkan langsung seperti itu. Misalnya *nyumbang* ini, *nyumbang* itu, puluhan juta kan gak bisa dipertanggungjawabkan, mengumpulkan orang dikasih transport, bagaimana cara pertanggungjawabkan. Itu, *kan*, sistemnya lamsam," katanya.

Senada dengan Hendrawan, politisi PAN, Saleh Daulay mengatakan, dirinya belum mengetahui dugaan kejanggalan kunjungan anggota Dewan itu. "Kunjungan fiktif yang mana? Anggota Dewan yang mana?" ujarnya.

Ketua Komisi Perempuan ini menambahkan, tidak ada kunjungan fiktif yang dilakukan Komisinya. Kunjungan kerja terakhir Komisi-nya diikuti semua anggota. "Ada fotonya, absennya bisa dicek," ujar Saleh. "Insya Allah di Komisi VIII tak ada (yang fiktif)."

Politisi Nasdem Johnny G Plate menambahkan, dia akan mengecek laporan BPK tersebut. Namun, Johnny mengaku ia belum menerima surat yang sama dari Sekretariat Jenderal DPR. "Saat ini kami sedang masa reses, nanti akan dicek," ujarnya.

Tunggu Laporan

Di tempat terpisah, KPK menunggu laporan atas temuan BPK terkait kunker perorangan anggota DPR yang diduga fiktif hingga berpotensi merugikan negara mencapai Rp 945 miliar.

"Kami perlu melihat dulu temuannya secara rinci seperti apa. Sejauh ini kami baru tahu dari pemberitaan saja," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Jumat (13/5).

BPK dikabarkan menemukan potensi kerugian negara dengan total Rp 945.465.000.000 yang berasal dari kunker fiktif anggota DPR. Laporan BPK tersebut telah diserahkan ke Kesetjenan DPR sebelum diteruskan ke 10 Fraksi di DPR. Adanya temuan BPK tersebut tentu semakin mempertegas kualitas anggota DPR semakin buruk.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, laporan BPK tersebut merupakan fakta atas dugaan banyaknya anggota DPR tidak pernah mengunjungi daerah pemilihan (dapil) pada saat reses namun menyimpangkan anggarannya. Temuan BPK itu juga mematahkan predikat wajar tanpa penge- cualian (WTP) yang selalu diberikan BPK kepada DPR. "Maka penyimpangan dana reses anggota semakin nyata," kata Lucius. [E-11/H-14]